



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA



**RENCANA KERJA
TAHUN 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURWAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024-2026 Capaian Renstra, analisis capaian kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Kami menyadari dokumen ini masih jauh sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan masukan dari semua pihak yang berkepentingan baik berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Harapan kami Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan capaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Purwakarta,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten purwakarta



YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP.,M.Si
NIP. 19790402 19981 01 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA	
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024	10
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	26
BAB III TUJUAN, SASARAN,PROGRAM, DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	38
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	38
3.3. Program dan Kegiatan	
BAB IV	
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	53
BAB V	
PENUTUP	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis. Perencanaan tersebut tertuang dalam rencana strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Purwakarta Tahun 2024-2026

Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
2. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan.

1.2. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Rencana Kerja Tahun 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
18. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
30. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 388);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262); Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 88 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 88);

40. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan.

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mengoprasional kan Rencana Kerja (RENJA) Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah Daerah, serta memudahkan melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) .

- **Bab. I Pendahuluan**

- 1.1. Latar Belakang

- 1.2. Landasan Hukum

- 1.3. Maksud dan Tujuan

- 1.4. Sistematika Penulisan

- **Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .

- **Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

- **Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.**

- **Bab V Penutup**

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2022 dan Capaian Kinerja Renstra Badan Kesbangpol.

Realisasi kinerja tercapai 100% hampir pada semua kegiatan pada tahun 2022, baik itu kegiatan teknis maupun kegiatan rutin. Kegiatan - kegiatan yang tercapai adalah sbb:

1. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah.
3. Pembinaan Kerukunan Umat beragama,
4. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
5. Seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan.
6. Pembinaan forum pembauran kebangsaan.
7. Penyuluhan kepada masyarakat.
8. Penyusunan administrasi bantuan parpol
9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
11. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12. Penyediaan jasa administrasi keuangan
13. Penyediaan jasa kebersihan Badan
14. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Badan
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
17. Pelayanan Administrasi PerBadanan
18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Badan
19. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
20. Pemeliharaan rutin/bekala perlengkapan gedung Badan
21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Badan

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja dikarenakan adanya keterbatasan dalam penganggaran serta pemenuhan target-target prioritas guna mendukung pemenuhan target sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29
REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA s.d TAHUN 2023

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Yang Berjalan 2023	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) 2023
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
01	01				PROGRA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
01	01	2	01	01	Penyusunan Perubahan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Dokumen Yang disusun	100%	100%	100%	99,79%	0%	100%	0%	
01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Kebutuhan Dokumen Yang disusun	100%	100%	100%	99,24%	42,71%	100%	42,71%	
01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Ketersediaan Gaji dan Tunjangan Bagi ASN	100%	100%	100%	92,24%	92,24%	100%	49,78%	100%	
01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Kebutuhan Dokumen Yang disusun	100%	100%	100%	99,55%	99,55%	100%	59,30%	100%	
01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
01	01	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Yang disusun	100%	100%	100%	99,63%	99,63%	100%	52,56%	100%	
1	2	05			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
1	2	05	2		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	
1	2	05	3		Pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100%	100%	100%	0%	0%	100%	64,75%	100%	
1	2	05	9		Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsu yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%	
01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										
01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Badan	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Perlengkapan Gedung Badan	100%	100%	100%	99,90%	99,90%	100%	53,03%	100%	

01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Badan	Jumlah Ketersediaan dan Perlengkapan Badan Gedung Badan yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	51,30%	100%
01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan alat rumah tangga yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	100%
01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Badan	Jumlah Ketersediaan Alat Tulis Badan dan ketersediaan makanan dan minuman yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	53,22%	100%
01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah ketersediaan Barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	100%	100%	100%	99,77%	99,77%	100%	49,32%	100%
01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah ketersediaan kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu yang dibutuhkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	35,49%	100%
01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan fasilitasi rapat 49koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	100%	99,95%	99,95%	100%	13,59%	100%
01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	0%	100%	100%	0%	0%	100%	0%	100%
1	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	2	07	6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0%	0%	0%	0%	0%	100%	99,88%	100%
01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat yang dibutuhkan	100%	100%	100%	95,20%	95,20%	100%	27,50%	100%

01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik	100%	100%	100%	84,19%	84,19%	100%	35,79%	100%
01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	Jumlah Penyediaan Jasa Tahun yang dibutuhkan	100%	100%	100%	9 1,83%	91,83%	100%	42,35%	100%
01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Jasa Service yang dibutuhkan	100%	100%	100%	97,73%	97,73%	100%	55,46%	100%
01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Badan yang dibutuhkan	100%	100%	100%	99,88%	99,88%	100%	0	100%
01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Badan	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Badan yang diperlukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41,71%	100%
2	2	01			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
2	2	01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan									
2	2	01	03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100%	100%	100%	94,35%	94,35%	100%	4,73%	100%

5	2	01			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
5.	2	01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya									
5.	2	01	03		Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi ketahanan Ekonomi, Sosial dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	100%	100%	99,99%	99,99%	100%	0%	100%
5.	2	01	04		Pelaksanaan kebijakan dibidang ideologi ketahanan Ekonomi, Sosial dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100%	100%	100%	82,65%	82,65%	100%	43,31%	100%
5.	2	01	05		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama	100%	100%	100%	91,31%	91,31%	100%	0%	100%

6	2	01			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONA DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK									
6	2	01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dab Penanganan Konflik Sosial									
6	2	01	04		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	97,68%	97,68%	100%	62,39%	100%
6	2	01	05		Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100%	100%	100%	91,60%	91,60%	100%	35,38%	100%
6	2	01	06		Pelaksanaan Koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan,	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar	100%	100%	100%	87,44%	87,44%	100%	0%	100%

3	2	01			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
3	2	01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes) Jumlah Peserta Yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Politik								
3	2	01	03		Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah	100%	100%	100%	99,86%	99,86%	100%	14,55%	100%
3	2	01	05		Pelaksanaan Kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai politik pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik	100%	100%	100%	62,88%	62,88%	100%	0%	100%

4	2	1			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
4	2	1			Perumusan Kebijakan teknis dan pementapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat									
4	2	1	05		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	100%	100%	100%	99,62%	99,62%	100%	0%	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 tahun 2016 Pasal 3 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta.

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkedudukan sebagai unsur penunjang otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dimana susunan Organisasi Badan, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Kasubbag Tata Usaha
- c. Seksi Ideologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama
- d. Seksi Politik dalam Negri dan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Adapun tugas pokok, fungsi dan uraian tugas masing jabatan adalah:

(1) Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dan bidang kesatuan bangsa;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

- f. merumuskan perencanaan kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup Badan;
- i. mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada setiap SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan, informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- k. melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- l. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- m. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- o. merumuskan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga yang meliputi kelembagaan partai politik dan hubungan organisasi kemasyarakatan;
- p. merumuskan kebijakan dibidang kesatuan bangsa yang meliputi pembauran dan wawasan kebangsaan;
- q. mengoordinasikan pengkajian dan perumusan kebijakan teknis operasional untuk pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;
- r. melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan bangsa dan politik;

- s. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan operasional bidang kesatuan bangsa dan politik;
- t. menerima dan menindak lanjuti informasi serta data dalam lingkup Badan Kesatuan bangsa dan politik ;
- u. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- v. menilai hasil kerja pegawai aparatur sipil negara dalam lingkungan Badan;
- w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- x. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Tata Usaha

Melaksanakan Koordinasi Kegiatan Penyusunan Program dan Pelaporan Serta Memberikan Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Hukum, Keuangan Dalam Lingkungan Badan.

- a. Pengelola Program dan Laporan
- b. Bendahara
- c. Pengelola Keuangan
- d. Analisis Program Keuangan dan Pelaporan
- e. Pengelola Kepegawaian
- f. Analisis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan
- g. Pengadministrasi Persuratan
- h. Pranata Kearsipan
- i. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
- j. Pengadministrasi Umum
- k. Administrasi Sarana dan Prasarana
- l. Pengelola Gaji

(3) Seksi Ideologi Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

- a. Pengadministrasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Analisis Wawasan Kebangsaan
 - c. Pengelola Wawasan Kebangsaan
 - d. Pengadministrasi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - e. Analisis Perlindungan Sumber Daya
 - f. Pengelola Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
- (4) Seksi Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- a. Analisis Politik Dalam Negeri
 - b. Pengelola Monitoring dan Evaluasi
 - c. Pengadministrasi Umum
 - d. Analisis Organisasi Kemasyarakatan
 - e. Pengelola Organisasi Kemasyarakatan
- (5) Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah
- a. Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat
 - b. Pengelola Data Intelijen
 - c. Pengadministrasi Umum
 - d. Pengelola Penanganan Konflik
 - e. Penyuluh Penanganan Konflik

Indikator kinerja pelayanan berdasar pada tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2024. Capaian kinerja pelayanan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel T.C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

[illegible]

	Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan															
	Tingkat penyelesaian konflik sosial			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00
	Indeks kepuasan masyarakat			Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
	Indeks Kerukunan Umat Beragama			Persen	70,98	69,27	72.7	74.45	70,98	69,27	72.7	74.45	0,70	0,69	0,72	0,74

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menghadapi beberapa isu-isu penting sebagai berikut:

- 1) Tingkat pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih rendah, sebagai akibat dari adanya keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana.
- 2) Kurangnya tenaga profesional yang paham dalam bidang tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan politik.
- 3) Kurangnya pemahaman dan implementasi ideologi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga menimbulkan :
 1. Menurunnya rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air.
 2. Menyebarnya ideologi / faham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila
 3. Meningkatnya radikalisme
 4. Intoleransi antar agama
 5. Separatisme dan Terorisme
 6. Konflik SARA
 7. Tergerusnya karakter / jatidiri bangsa dan kearifan lokal
 8. Masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia
 9. Pengaruh negatif globalisasi dan kecanggihan teknologi telekomunikasi / keterbukaan mengakses informasi yang tidak di imbangi kemampuan menangkal atau meng-*conter* informasi negatif tsb.
- 4) Belum optimalnya sinergisitas dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- 5) Tingginya kuantitas keberadaaan kelompok masyarakat dalam berserikat dan berkumpul yang diwadahi melalui organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang belum dapat

diimbangi dengan kualitas keberdayaan Ormas yang baik, sehingga memunculkan kondisi/aktivitas Ormas yang kurang produktif/cenderung melanggar peraturan perundang-undangan.

- 6) Penguatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan (Ormas) sebagai mitra dan media komunikasi sosial dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang politik dan pemerintahan umum.
- 7) Berkembangnya gangguan penyakit masyarakat khususnya penyalahgunaan narkoba dikarenakan belum optimalnya penanganan gangguan penyakit masyarakat khususnya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kurangnya pengetahuan, pemahaman dan implementasi dibidang politik bagi kader anggota partai politik dan masyarakat, pemilih pemula, perempuan dan kaum marjinal

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berikut review terhadap rancangan awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:

(Tabel T.C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				9.709.398.223					9.709.398.223	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				350.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				350.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Purwakarta			350.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Purwakarta			350.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Purwakarta	Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	350.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Purwakarta	Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	350.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Purwakarta			3.170.763.489	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Purwakarta			3.170.763.489	

Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Purwakarta			3.170.763.489	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Purwakarta			1.664.987.691	
Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah	Orang	3.070.763.489	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah	Orang	3.070.763.489	
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai politik pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik didaerah	Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai politik pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik didaerah	Laporan	100.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Purwakarta			250.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Purwakarta			250.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Purwakarta			250.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Purwakarta			250.000.000	

Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Purwakarta	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Orang	250.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Purwakarta	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Orang	250.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Purwakarta			500.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Purwakarta			500.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Purwakarta			500.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Purwakarta			500.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50.000.000	Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50.000.000	

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	350.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	350.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Purwakarta			1.350.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Purwakarta			1.350.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Purwakarta			1.350.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Purwakarta			1.350.000.000	
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150.000.000	

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	500.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	500.000.000	
Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	700.000.000	Pelaksanaan Forum Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	700.000.000	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Purwakarta			9.840.404.922	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Purwakarta			9.840.404.922	
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta			50.000.000	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta			50.000.000	
Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10.000.000	Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Purwakarta	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil	Dokumen	10.000.000	
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	umlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	10.000.000	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta	umlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	10.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10.000.000	
Administrasi Keuangan	Purwakarta			1.805.936.070	Administrasi Keuangan	Purwakarta			1.805.936.070	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	1.765.936.070	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bul an	1.765.936.070	
koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10.000.000	koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Laporan	10.000.000	

							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10.000.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulangan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulangan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	10.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah					
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD		Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	80.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	80.000.000	
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10.000.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10.000.000	

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50.00.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50.00.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	150.000.000	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	150.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	100.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	100.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Paket	50.000.000	
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150.000.000	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150.000.000	

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	50.000.000	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada		Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Dokumen	50.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	200.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	200.000.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	150.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	150.000.000	
Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	100.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	150.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	50.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	70.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	542.698.664	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	542.698.664	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Badan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi i Gedung Badan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Pendukung Gedung Badan atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Pendukung Gedung Badan atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	50.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	50.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Unit	50.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berikut Usulan program dan kegiatan masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta:

(Tabel TC.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
KABUPATEN PURWAKARTA

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta guna mendukung program prioritas pemerintah dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan peran forum/pokja dalam rangka deteksi dini dan cegah dini.
- 2) Menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat.
- 3) Mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas.
- 4) Meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dapat dirumuskan tujuan yaitu: “Menciptakan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan”, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran serta forum-forum dalam rangka deteksi dini,
2. Meningkatnya nilai-nilai wawasan kebangsaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran bela Negara.
3. Terciptanya kerukunan antar dan intra umat beragama dan pembauran kebangsaan,
4. Optimalnya Pengawasan melalui pendataan serta pemberdayaan ormas,
5. Meningkatnya pendidikan politik bagi masyarakat (Pemilih Pemula) dan Partai politik

3.3. Program dan Kegiatan

(Tabel T.C-3.3)

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN
2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURWAKARTA

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8	1				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.509.398.223				11.560.338.045
8	1	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Persen	1.150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persen	1.265.000.000
8	1	2	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	1.150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	1.265.000.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	2	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsaan, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	1.150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	1.265.000.000
8	1	3			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1. Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkades) 2. Tingkat peserta pembinaan kegiatan politik	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Persen	3.170.763.489	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persen	3.189.831.074

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	3	2,01	4	Pelaksanaan Kebijakan Teknis Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	3.070.763.489	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	4.400.036.220
8	1	3	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai politik pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik di daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	105.000.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	persen	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persen	252.000.000
8	1	4	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1. Jumlah Ormas yang Menyampaikan Pendaftaran, Evaluasi Laporan Kegiatan 2. Jumlah Pengawasan Ormas LSM yang telah Dilaksanakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	252.000.000
8	1	4	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	250.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	252.000.000
8	1	5			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Persen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persen	505.500.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	5	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	1. Persentase Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba 2. Persentase Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1.Orang 2.Persen	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1.Orang 2.Persen	505.500.000
8	1	5	2,01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	103.000.000
8	1	5	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	52.000.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	5	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	350.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	352.000.000
8	1	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Persen	1.185.958.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persen	1.304.553.910
8	1	6	2,01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1. Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Daerah 2. Jumlah Pemantauan, Deteksi dini, Pengamanan di Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	1.Dokumen 2.Laporan	1.185.958.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1.Dokumen 2.Laporan	1.304.553.910

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	6	2,01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	152.000.000
8	1	6	2,01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	500.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	505.000.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	6	2,01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Dokumen	700.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	702.000.000
8	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Predikat	4.088.634.734	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Predikat	4.192.328.341
8	1	1	2,01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat kinerja yang di susun	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Dokumen, Laporan	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen,Laporan	52.500.000
8	1	1	2,01	1	Penyusuna Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	10.500.000
8	1	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	10.500.000
					Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	10.500.000
					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	umlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	10.500.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporam	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	10.500.000
8	1	1	2,02		Administrasi Keuangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Orang/Bulan, Dokumen, Laporan	1.805.936.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang/Bulan, Dokumen, Laporan	1.884.529.677
8	1	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Ciseureuh	Orang/Bulan	1.765.936.070	PENDAPATAN ASLI DAERAH		14 Bulan	1.842.529.677
8	1	1	2,02	5	koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		1 Dokumen	10.500.000
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	10.500.000
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Nagri Kaler	Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	10.500.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulangan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	10.500.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	1	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	10.500.000
8	1	1	2,03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	10.500.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Dibutuhkan	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Paket, Dokumen, Orang	140.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket, Dokumen, Orang	141.500.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Paket	80.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket	80.500.000
					Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Dokumen	10.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	10.500.000
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Orang	50.00.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Orang	50.500.000
8	1	1	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan			620.000.000				629.500.000
8	1	1	2,06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Badan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket	50.500.000
8	1	1	2,06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta,	Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket	50.500.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Paket	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket	20.500.000
8	1	1	2,06	4	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Paket	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket	152.000.000
8	1	1	2,06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Paket	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket	103.000.000
8	1	1	2,06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Paket	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Paket	50.500.000
8	1	1	2,06	9	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Laporan	152.000.000
8	1	1	2,06	11	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terfasilitasinya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Dokumen	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Dokumen	50.500.000
8	1	1	2,06		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan	Kab. Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Unit	650.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Unit	658.000.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab.purwakarta,purwakarta,nagri kaler	unit	200.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		unit	203.000.000
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab.purwakarta,purwakarta,nagri kaler	unit	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		unit	152.000.000
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab.purwakarta,purwakarta,nagri kaler	unit	100.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		unit	100.500.000
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab.purwakarta,purwakarta,nagri kaler	unit	150.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		unit	155.000.000
8	1	1	2,06	1	Pengadaan Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.purwakarta,purwakarta,nagri kaler	unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		unit	50.500.000
8	1	1	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan			632.698.664				633.798.664
8	1	1	2,08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	20.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		11 Dokumen	20.500.000

Kode					Perangkat Daerah/bidang urusan/ program /kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	1	1	2,08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	70.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		12 Bulan	70.500.000
8	1	1	2,8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Badan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Laporan	542.698.664	PENDAPATAN ASLI DAERAH		13 Bulan	596.968.530
8	1	1	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Unit	180.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Unit	182.000.000
8	1	1	2,09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Badan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Unit	30.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Unit	30.500.000
8	1	1	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana, Pendukung Gedung Badan atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Unit	50.500.000
8	1	1	2,09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Purwakarta, Purwakarta, Nagri Kaler	Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Unit	50.500.000
					Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	Kab.Purwakarta, Purwakarta	Unit	50.000.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Unit	50.500.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan rumusan program dan kegiatan beserta indicator Kinerja dan pagu indikatif, yang disajikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut :

TABEL T.C 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN 2024

No	Kode Rekening	Uraian Program/Keg/Subkeg	Indikator	Target	Pagu Anggaran Renja 2024	Sumber Dana	Keterangan
	8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10.509.398.223		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			10.509.398.223		
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	4.088.634.734	PAD	
	8.01.01.2.01	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat kinerja yang di susun	Dokumen, Laporan	50.000.000	PAD	
	8.01.01.2.01.0003	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10.000.000	PAD	
	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	10.000.000	PAD	
	8.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKP	Dokumen	10.000.000	PAD	
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	10.000.000	PAD	
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10.000.000	PAD	
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN, Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun			PAD	

	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	1,765,936,070	PAD	
	8.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	10,000,000	PAD	
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10,000,000	PAD	
	8.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10,000,000	PAD	
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	10,000,000	PAD	
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Yang Disusun	Laporan	10,000,000	PAD	
	8.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	10,000,000	PAD	
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Dibutuhkan	Paket, Dokumen, Orang	140.000.000	PAD	
	8.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	80,000,000	PAD	
	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	10,000,000	PAD	

	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	50,000,000	PAD	
	8.01.01.2.06	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pengelolaan Administrasi Umum Yang Dilaksanakan	Paket, Laporan, Dokumen		PAD	
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	50,000,000	PAD	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	50,000,000	PAD	
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	20.000.000	PAD	
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	150,000,000	PAD	
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	Paket	100.000.000	PAD	
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	50.000.000	PAD	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	150.000.000	PAD	
	8.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	50.000.000	PAD	
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan	Unit		PAD	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	200.000.000	PAD	

	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	150.000.000	PAD	
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	100.000.000	PAD	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	150.000.000	PAD	
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	50.000.000	PAD	
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dibutuhkan	Laporan		PAD	
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	20.000.000	PAD	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	70.000.000	PAD	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	542,698,664	PAD	
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit		PAD	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30.000.000	PAD	
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50.000.000	PAD	
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	50.000.000	PAD	

	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	50.000.000	PAD	
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Tingkat peserta pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persen	1.150.000.000	PAD	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.150.000.000	PAD	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Kebangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.150.000.000	PAD	
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Persen	3.170.763.489	PAD	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum	Jumlah Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Pemilu (Pilkada, Pileg, Pilpres dan Pilkadaes)	Orang	3.170.763.489	PAD	

		Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politi					
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik didaerah	Orang	3.070.763.489	PAD	
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai politik pemilihan umum/Pemilihan umum Kepala Daerah, serta pemantauan Situasi Politik didaerah	Laporan	100.000.000	PAD	
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang menyampaikan laporan kegiatan	Persen	250.000.000	PAD	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang Menyampaikan Pendaftaran, Evaluasi Laporan Kegiatan	Orang	250.000.000		
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, Evaluasi dan mediasi		250.000.000		

			Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing				
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Tingkat peserta pembinaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	Persen	500.000.000	PAD	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Pembinaan Penyalahgunaan Narkoba	Orang	500.000.000	PAD	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	100.000.000	PAD	
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	50.000.000	PAD	
	8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	350.000.000	PAD	

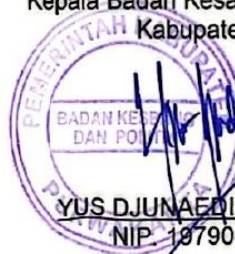
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Tingkat penyelesaian konflik sosial	Persen	1.350.000.000	PAD	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Penurunan Konflik Sosial di Daerah	Dokumen	1.350.000.000	PAD	
	88.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	150.000.000	PAD	
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	500.000.000	PAD	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	700.000.000	PAD	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan pada Renstra Bakesbangpol 2024-2026 dan RKPD 2024 serta disesuaikan pula dengan kemampuan dukungan sumber daya dan dukungan dana yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta, dilaksanakan dengan baik untuk mengemban visi dan misi yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja. Demikian Renja 2024 disusun serta dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Purwakarta pada tahun 2024 yang akan dicapai nantinya.

Purwakarta,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten purwakarta



YUS DJUNAEDI RUSLI, S.STP., M.Si
NIP. 19790402 19981 01 0